

**WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM MENGHENTIKAN PERKARA
PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**



OLEH :

ERWIN YOHANES

02111071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penelitian	9
5. Metode Penelitian	10
a. Pendekatan Masalah	10
b. Sumber Bahan Hukum	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
d. Analisis Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II : DEFINISI DEPONERING MENURUT BEBERAPA PENDAPAT AHLI dan PERUNDANG-UNDANGAN	14
1. Dasar Pengaturan Jaksa Penuntut Umum	14
2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	20
3. Perbedaan <i>Deponering</i> dengan Penghentian Penuntutan	29

BAB III : AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENGESAMPINGKAN ATAU <i>DEPONERING</i> SERTA PERTIMBANGAN JAKSA AGUNG DALAM MENGHENTIKAN PERKARA PIDANA	34
1. Dasar Pertimbangan Jaksa Agung Mendeponeriong Kasus AS dan BW	34
2. Analisis/Pembahasan Terbitnya Keputusan Jaksa Agung yang <i>Mendeponering</i> AS dan BW	36
BAB IV : PENUTUP	51
1. Kesimpulan	51
2. Saran	52
DAFTAR BACAAN	

WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM MENGHENTIKAN PERKARA PIDANA

ABSTRAK

Pada dasarnya, ada beberapa kewenangan Jaksa Agung dalam menghentikan proses perkara pidana. Namun, dalam kasus ini, penulis cuma mengambil contoh kasus yang pernah mendara para pimpinan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dua periode, yakni pada kepemimpinan Bibit-Candra dan terakhir pada masa kepemimpinan Abraham Samad dan Bambang Widjayanto.

Para pemimpin KPK ini, mengalami persoalan yang sama, yakni terbelit kasus pidana. Entah itu direkayasa atau pun tidak, namun yang jelas, satu hal yang juga sama adalah nasib kasus mereka tidak pernah sampai ke pengadilan. Hak privilege Jaksa Agung untuk melakukan deponering ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 35 huruf C UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Alasan yang digunakan oleh Jaksa Agung, tentu saja mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Atas dasar ini lah, maka timbul rumusan masalah. Pertama, apakah definisi dari deponering itu sendiri dan apa akibat hukum serta pertimbangan Jaksa Agung menghentikan atau mengesampingkan atau *deponering* perkara pidana untuk kepentingan umum telah sesuai dengan prinsip hukum pidana ?

Secara perundang-undangan, Jaksa Agung memiliki kewenangan prerogative yang termaktub dalam pasal 35 huruf C UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pasal tersebut dinyatakan salah satu kewenangan JA adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kepentingan umum yang dimaksud adalah setelah mempertimbangkan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan masalah tersebut. Namun seperti diketahui, pada dasarnya penegakkan hukum mengandung makna bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang.

Philipus M. Hadjon menyatakan negara hukum merupakan terjemahan dari *the rule of law*. Menurut teori kedaulatan hukum, negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan tetapi harus berdasarkan atas hukum.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi untuk kepentingan umum. Seseorang yang cukup terbukti melakukan tindak pidana, perkaranya dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan kepentingan demi kepentingan umum. Itulah sebabnya azas *oportunitas* ini bersifat diskriminatif dan menggagahi salah satu prinsip hukum *equality before the law* atau persamaan kedudukan di depan hukum.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Definisi Deponering menurut Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tidak melakukan penuntutan atau mengesampingkan penuntutan demi kepentingan umum. Penjelasan pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
- b. Akibat hukum terhadap tindakan mengesampingkan atau *deponering* perkara pidana untuk kepentingan umum oleh jaksa agung, maka jaksa penuntut umum dengan mendasarkan pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tidak melakukan penuntutan atau mengesampingkan penuntutan. Meskipun tersangka berdasarkan hasil penyidikan dengan dua alat bukti sah terbukti melakukan tindak pidana, jaksa penuntut umum menghentikannya untuk tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan di persidangan. Pertimbangan Jaksa Agung yang *deponering* Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tidak sesuai dengan prinsip hukum pidana di antaranya asas legalitas dan persamaan di hadapan hukum. *Mendeponering* atau mengesampingkan perkara dengan pertimbangan untuk kepentingan umum yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

2. Saran

- a. *Mendeponering* atau mengesampingkan perkara merupakan wewenang dari Jaksa Agung, namun dalam menjalankan wewenangnyanya tersebut agar terdapat suatu kepastian dan perlindungan hukum hendaknya Jaksa Agung sebelum *mendeponering* tersangka melakukan dan mendengarkan suara dari para praktisi.
- b. Hendaknya mengenai untuk kepentingan umum sebagai pertimbangan Jaksa Agung *mendeponering* tersebut diberikan suatu penjelasan yang tegas dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU No. 16 Tahun 2004 agar terdapat suatu kepastian hukum baik bagi Jaksa Agung maupun tersangka.

DAFTAR BACAAN

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Hadjon, Philipus M., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hukum Acara Pidana Indonesia,
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, 2000
- Kansil, Cst, Christine S.t Kansil,Engelien R, Palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Kristiana, Yudi, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Ohtimur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Prakoso, Djoko, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, 1985
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Schaffmeister, D., N. Keijzer & Sutorius, Editor Penterjemah oleh J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006

Simanjuntak, Osman, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*,.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983

Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992

Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Yasabari, Nasroen, *Mengerling Hukum Positif Kita*, Alumni Bandung, 1979